



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



MEMBANGUN CITRA POSITIF PERUSAHAAN MELALUI PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN

¹Aditya Pandu Wicaksono, ²Rizky Windar Amelia, ³Desi Zulvina, ⁴Wulan Suci Rachmadani

¹Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Yogyakarta 55584

²Universitas Widya Dharma, Jl. Ki Hajar Dewantoro No.Desa, Klaten 57438

³Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta 57126

⁴Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Semarang 50229

Surel: aditya.pandu@uii.ac.id

Volume 12
Nomor 1
Halaman 450-478
Malang, April 20201
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
29 November 2020
Tanggal Revisi:
24 Maret 2021
Tanggal Diterima:
30 April 2021

Kata kunci:

kepemilikan asing,
kepemilikan pemerintah,
operasi internasional,
pengungkapan
lingkungan

Mengutip ini sebagai:

Wicaksono, A. P., Amelia, R. W., Zulvina, D., & Rachmadani, W. S. (2021). Membangun Citra Positif Perusahaan melalui Pengungkapan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (1), 27-45. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.02>



Abstrak - Membangun Citra Positif Perusahaan melalui Pengungkapan Lingkungan

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pengungkapan lingkungan berdasarkan pada tiga skenario penelitian yaitu kepemilikan pemerintah, asing, dan operasi internasional.

Metode - Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan frekuensi pengungkapan lingkungan perusahaan di Indonesia. Tingkat pengungkapan lingkungan diukur menggunakan kategori GRI.

Temuan Utama - Penelitian ini menemukan bahwa adanya kepemilikan pemerintah mendorong pengungkapan pada aspek lingkungan tertentu terutama pada aspek yang memberikan dampak citra positif perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan asing mengungkapkan aspek lingkungan lebih banyak daripada yang tidak. Perusahaan dengan operasi internasional mengungkapkan aspek lingkungan lebih banyak karena perusahaan memiliki ruang lingkup stakeholder yang lebih luas.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini memberikan fakta bahwa ruang lingkup stakeholder yang luas menghasilkan pengungkapan lingkungan lebih banyak. Perusahaan perlu memahami kategori pengungkapan yang diminta stakeholder.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini menggunakan tiga skenario penelitian mengenai pengungkapan lingkungan.

Abstract - Building Corporate Positive Image through Environmental Disclosure

Main Purpose - This research was conducted to compare environmental disclosure level according to three scenarios namely government ownership, foreign ownership, and international operation.

Method - This research applied qualitative descriptive method by comparing the frequency of environmental disclosure of Indonesian companies. The level of environmental disclosure was measured using GRI categories.

Main Findings - This research found that companies having government ownership disclosed more aspect than the other one especially positive-image-generated aspects. Companies with foreign ownership have the higher frequency in almost all environmental disclosure aspects than others. Internationally operation companies disclosed more environmental aspect because of the broader scope of companies' stakeholders.

Theory and Practical Implications - This research provided the fact that broader scope of stakeholders resulted more aspects disclosed by companies. Companies need to understand the category(es) that demanded by stakeholders.

Novelty - This research used three research scenarios about environmental disclosure.

Berbagai dampak negatif dari operasional bisnis telah terlihat dengan nyata di bumi kita seperti perubahan iklim (Comyns, 2018; Finke et al., 2016; Kanyama et al., 2018), terancamnya eksistensi keanekaragaman hayati (Adler et al., 2018; Wolff, et al., 2017; Heniwati & Asni, 2019), persoalan limbah (Siskawati & Susilawati, 2017), dan ketersediaan air bersih (Molinos-Senante et al., 2017; Walker et al., 2019). Hal ini menyebabkan perusahaan mendapatkan perhatian serius dari berbagai *stakeholder*. Semua tipe *stakeholder*, baik primer maupun sekunder, memiliki kesempatan untuk menekan perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab tertentu (Hossain & Alam, 2016; Nyahas et al., 2018). Dampak dari itu legitimasi perusahaan sangat mudah terancam jika nilai perusahaan tidak sejalan dengan nilai *stakeholder* (Bachmann & Inghoff, 2016). Perusahaan perlu untuk menyesuaikan bahkan memenuhi apa yang *stakeholder* harapkan. Pengungkapan lingkungan menjadi sarana untuk memenuhi permintaan *stakeholder* dan mengurangi asimetri informasi seiring meningkatnya perhatian pada dampak perusahaan terhadap lingkungan (Louie et al., 2019). Pengungkapan merupakan produk dari akuntansi yang menjadi bagian dari hak manusia untuk mendapatkan informasi atas performa tanggung jawab perusahaan (Hazelton, 2013).

Di Indonesia pengungkapan atas tanggung jawab telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Namun, peraturan tersebut belum memiliki bentuk standar pengungkapan sehingga isi pengungkapan masih dibiarkan dan bergantung sepenuhnya dengan kebijakan perusahaan (Cahaya et al., 2015). Dengan kata lain, perusahaan wajib melaporkan aktivitas keberlanjutannya tetapi isi laporan bergantung pada ketertarikan perusahaan. Di sisi lain, setiap *stakeholder* memiliki kekuatan dan tujuan yang berbeda-beda sehingga memaksa perusahaan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkannya. Menurut *positive stakeholder theory* perusahaan memprioritaskan kewajiban pelayanan kepada *stakeholder* dengan kekuatan (*power*) lebih tinggi (Clarkson, 1995). *Ethical stakeholder theory* menjelaskan bahwa perusahaan menyediakan informasi kepada seluruh *stakeholder*-nya meskipun mereka tidak menggunakan informasi yang telah diberikan (Bella & Al-Fayoumi, 2016; Dobbs & Staden, 2016). Hal ini terkesan subjektif dan tidak

konsisten karena pengklasifikasian *stakeholder* tergantung pada kondisi perusahaan dan bahkan antarpelaku berbeda. Gunawan (2015) berargumen bahwa tingkatan *stakeholder* berbeda sehingga perlu untuk dipertimbangkan berbeda pula. Semua *stakeholder* yang termasuk kelompok sekunder dapat menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan (Wicaksono & Kholid, 2019).

Villiers & Alexander (2014) berargumen *shareholder* memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk mampu mempengaruhi prosedur dan kebijakan internal perusahaan termasuk hal pengungkapan. Sejak isu struktur kepemilikan dengan kuat mempengaruhi pengungkapan perusahaan, peneliti menguji lebih detail berdasarkan subjek kepemilikan saham perusahaan seperti kepemilikan pemerintah (Ismail et al., 2018) dan kepemilikan asing (He & Loftus, 2014). Logika yang mendasari adalah perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan melakukan pengungkapan dalam rangka memenuhi regulasi dari pemerintah sebagai regulator (Cahaya et al., 2017). Selain itu, dengan adanya kepemilikan asing, perusahaan akan melakukan pengungkapan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi informasi karena adanya perbedaan geografis (Cai et al., 2019; Parker et al., 2015). Peneliti kemudian menambahkan aspek operasi internasional sebagai bagian dari tekanan karena perusahaan akan memiliki ruang lingkup *stakeholder* lebih luas sehingga pengungkapan diperlukan untuk mengikuti dan memenuhi standar dan kriteria pengungkapan lingkungan di negara operasi (Ijabadeniyi & Govender, 2019). Operasi internasional perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap pihak-pihak di dalam negara tersebut dan menjadi *stakeholder* perusahaan. Perusahaan kemudian perlu untuk memperhatikan ekspektasi mereka dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjaga hubungan baik perusahaan dengan *stakeholder* dan mempertahankan legitimasi perusahaan untuk beroperasi di negaranya.

Bendell et al. (2011) menemukan bahwa pemerintah mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lingkungan. Lebih lanjut, Ijabadeniyi & Govender (2019) menemukan bahwa perusahaan dengan adanya kebergantungan dengan pemerintah cenderung lebih tertekan sehingga pengungkapan menjadi media untuk menjawab tekanan. Sayangnya Lu

& Abeysekera (2014) dan Rangkuti et al. (2019) menemukan kepemilikan pemerintah bukanlah determinan utama dari pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Dalam konteks kepemilikan asing peneliti juga menemukan ketidakkonsistenan hasil mengenai pengaruhnya terhadap pengungkapan. He & Loftus (2014) menemukan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan perusahaan. Ismail et al. (2018) menemukan hasil yang berlawanan yaitu kepemilikan asing merupakan faktor yang mendorong pengungkapan karena semakin luasnya stakeholder yang memiliki keunikan yang berbeda. Berkaitan dengan temuan tersebut Cahaya et al. (2017) menguji operasi internasional terhadap pengungkapan CSR dan menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Adanya inkonsistensi pengaruh tersebut menimbulkan dugaan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan tidak pada semua aspek tetapi hanya berfokus pada kategori tertentu yang diharapkan oleh *stakeholder*. Untuk membuktikan dugaan itu, penelitian ini dilakukan dengan cara mengupas secara deskriptif pengungkapan lingkungan perusahaan dengan membagi perusahaan sampel menjadi dua berdasarkan pada ada tidaknya kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan operasi internasional. Setelah itu, membandingkan pengungkapan dari dua kelompok perusahaan pada tiga skenario tersebut untuk menjawab pertanyaan di atas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan di Indonesia berdasarkan pada tiga skenario di atas. Selain itu, penelitian ini juga mencari tahu alasan di balik pengungkapan dari aspek lingkungan yang dominan dilakukan perusahaan berdasarkan pada pedoman GRI. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi penting pada literatur. Pertama, penelitian ini memberikan fakta mengenai tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan melalui proses komparasi perusahaan berdasarkan pada kepemilikan pemerintah, asing, dan beroperasi secara internasional. Kedua, penelitian ini memberikan bukti tentang kategori lingkungan apa yang paling sering diungkapkan oleh setiap kelompok perusahaan berdasarkan pada tiga skenario tersebut. Ketiga, penelitian ini membantu untuk meredakan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh

tekanan *stakeholder* khususnya pemerintah dan asing sebagai *shareholder* terhadap pengungkapan lingkungan.

METODE

Penelitian ini mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif dengan membaca secara cermat isi laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Seperti tujuan penelitian ini untuk menemukan fenomena di balik pengungkapan lingkungan perusahaan, analisis isi ini dilakukan untuk menemukan kategori lingkungan apa yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan. Kemudian kategori tersebut dicatat dan ditampilkan secara deskriptif untuk dianalisis dan mencari alasan yang mungkin pada aspek yang banyak dan sedikit diungkapkan. Oleh karena itu, penerapan metode kualitatif deskriptif ini tepat untuk digunakan karena menghasilkan fakta mengenai tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan.

Preslmayer et al. (2018) berargumentasi bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk meningkatkan keakuratan profil dari kejadian, orang, dan situasi. Hal ini mungkin belum banyak ditangkap oleh penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan metode kuantitatif menyediakan prediksi hubungan antarvariabel diteliti yang hasilnya berpotensi tidak konsisten antarpenelitian. Pada sisi yang lain, penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui fenomenologi membahas fenomena tertentu secara mendalam, tetapi ruang lingkup penelitian sempit dan hasilnya sulit untuk digeneralisasikan (Amos, 20018; Iyer & Jarvis, 2019).

Penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang tersedia di *database* Global Reporting pada alamat *website* <https://database.globalreporting.org/search/>. Laporan keberlanjutan yang diambil adalah laporan dari seluruh perusahaan Indonesia yang terdaftar di *database* tersebut. Penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan tahun 2018 dengan justifikasi bahwa laporan tersebut merupakan yang terbaru dan telah dipublikasikan oleh perusahaan. Dalam rangka menjaga konsistensi, laporan keberlanjutan yang diteliti merupakan laporan yang disusun dengan pedoman dari *Global Reporting Initiatives Standard* versi keempat (GRI 4) kare-

na merupakan panduan terbaru yang sudah banyak diaplikasikan oleh perusahaan di dunia. GRI 4, pada kategori lingkungan, memiliki 12 aspek yang disarankan untuk diungkapkan yaitu bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, tumpahan dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, asesmen lingkungan pada pemasok, dan pengaduan masalah lingkungan.

Dari penerapan kriteria tersebut diperoleh 62 perusahaan yang laporan keberlanjutannya menjadi objek penelitian. Kemudian, penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, peneliti membaca dengan seksama laporan keberlanjutan setiap perusahaan untuk menemukan aspek dari kategori lingkungan yang telah diungkapkan. Peneliti memberikan tanda (V) apabila perusahaan mengungkapkan aspek lingkungan tertentu, sedangkan tanda (X) jika tidak melakukan pengungkapan aspek tertentu. Data ini diperoleh dari halaman indeks GRI yang ada di bagian akhir laporan keberlanjutan perusahaan. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti melakukan cek secara manual setiap pengungkapan lingkungan perusahaan di dalam laporan keberlanjutan dengan pedoman pengungkapan lingkungan yang direkomendasikan oleh GRI.

Kedua, peneliti mencari informasi tentang ada tidaknya pemerintah sebagai *shareholder* perusahaan. Informasi ini diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan keberlanjutan, laporan tahunan, *website* perusahaan, serta sumber lain yang dapat diandalkan. Penelitian tidak memberikan perhatian pada seberapa besar porsi kepemilikan pemerintah pada perusahaan tersebut. Hal ini didasarkan pada peran pemerintah sebagai regulator dalam praktik pertanggungjawaban perusahaan di mana perusahaan menjadi teregulasi untuk menampilkan praktik pengungkapan pertanggungjawaban. Keberadaan pemerintah di dalam struktur kepemilikan perusahaan dianggap memudahkan pemerintah untuk mengawasi praktik pertanggungjawaban suatu perusahaan meskipun struktur kepemilikan perusahaan tidak terkonsentrasi pada pemerintah.

Ketiga, peneliti mencari informasi tentang ada tidaknya investor asing baik individu maupun institusi sebagai *shareholder* perusahaan. Sama seperti kepemilikan pemerintah, informasi diambil dari berbagai sumber baik dari laporan keberlanjutan, laporan tahunan, *website* perusahaan, maupun sumber lain yang dapat diandal-

kan. Penelitian ini juga mengabaikan porsi kepemilikan asing pada suatu perusahaan. Keempat, peneliti mencari tahu apakah perusahaan beroperasi secara internasional atau tidak.

Definisi operasi internasional mengikuti argumentasi dari Ijabadeniyi & Govender (2019) yang menyebutkan bahwa perusahaan memiliki penjualan luar negeri, anak perusahaan di luar negeri, atau cabang di luar negeri. Dalam proses menentukan operasi internasional perusahaan, penelitian ini tidak menggunakan kriteria batas minimum pada jumlah penjualan luar negeri, anak perusahaan luar negeri, maupun cabang luar negeri. Penelitian ini menggunakan operasi internasional sebagai representatif dari *stakeholder* luar negeri di mana perusahaan beroperasi di luar negara asalnya.

Data tersebut kemudian dikelola baik secara keseluruhan maupun membagi perusahaan ke dalam dua kelompok berdasarkan pada setiap skenario yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan operasi internasional. Pertama, analisis dilakukan dengan cara melihat aspek lingkungan yang dominan diungkapkan oleh perusahaan sampel secara keseluruhan dan mencari alasan mengapa aspek tersebut diungkapkan. Kedua, analisis dilakukan dengan membandingkan tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan berdasarkan pada tiga skenario di atas. Analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan tingkat pengungkapan lingkungan pada perusahaan dengan kepemilikan pemerintah dan nonpemerintah, kepemilikan asing dan nonkepemilikan asing, dan perusahaan beroperasi secara internasional dan nasional.

Penelitian ini menyadari bahwa dalam proses analisis perbandingan di setiap skenario jumlah perusahaan antarkelompok akan berbeda atau tidak setara (misalnya jumlah perusahaan nonkepemilikan pemerintah lebih banyak daripada kepemilikan pemerintah). Untuk menciptakan perbandingan yang adil, penelitian ini perlu untuk menyelaraskan jumlah perusahaan di setiap kelompok dengan mengalikan jumlah perusahaan di kelompok yang lebih kecil untuk memiliki jumlah yang sama dengan kelompok lain. Kemudian, jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan pada setiap aspek lingkungan pada kelompok dengan jumlah sampel lebih kecil juga dikalikan dengan nilai pada saat menyelaraskan jum-

lah sampel di setiap kelompok (Lihat Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4). Langkah ini akan memberikan bukti secara deskriptif perbedaan tingkat pengungkapan lingkungan antarkelompok perusahaan dan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan ketika adanya pemerintah dan asing di struktur kepemilikan dan perusahaan beroperasi secara internasional yang merupakan *stakeholder* dari perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan perusahaan didorong oleh adanya pengaruh dan tekanan dari *stakeholder* untuk memberikan perhatian pada dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan. Selain itu, pengungkapan perusahaan juga dilakukan untuk menyediakan informasi kepada *stakeholder* tentang aktivitas pertanggungjawaban yang telah dilakukan dan bermanfaat untuk mempertahankan hubungan baik dengan *stakeholder*-nya. Clarkson (1995) mendefinisikan *stakeholder* sebagai orang atau kelompok yang memiliki kepemilikan, hak, atau ketertarikan pada perusahaan dan aktivitasnya di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dari definisi itu terdapat dua kelompok *stakeholder* yaitu primer dan sekunder. *Stakeholder* primer diartikan sebagai kelompok yang sangat penting karena perusahaan tidak dapat bertahan tanpa keberadaan mereka. *Stakeholder* primer umumnya berisi pemegang saham, investor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan komunitas yang menyediakan infrastruktur dan pasar (Nielsen & Thomsen, 2018). *Stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau terpengaruh oleh perusahaan tetapi tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan bukan faktor penentu keberlangsungan perusahaan. *Stakeholder* sekunder biasanya berisi media dan kelompok ketertarikan lain yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi opini publik (Lock & Schulz-Knappe, 2019).

Berdasarkan teori *stakeholder* terdapat perdebatan dalam literatur mengenai apakah perusahaan perlu untuk memperlakukan semua kelompok *stakeholder* secara adil atau hanya pada beberapa kelompok yang dianggap sebagai *stakeholder* kunci. Perdebatan ini memunculkan dua cabang dari teori *stakeholder* yaitu cabang *ethical* dan *positive*. Cabang *ethical* dari teori *stakeholder* menekankan perusahaan untuk memperlakukan semua *stakeholder* secara adil demi

kebaikan bersama baik perusahaan maupun *stakeholder*. Cabang ini menjelaskan bahwa perusahaan memberikan informasi kepada semua *stakeholder* meskipun informasi tersebut tidak digunakan oleh mereka (Bella & Al-Fayoumi, 2016; Dobbs & Staden, 2016). Cabang *positive* dari teori *stakeholder* membolehkan manajer untuk memilih dan menentukan kelompok penting yang akan mendapatkan perhatian dari perusahaan dan dianggap sebagai *stakeholder* primer. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan tidak bergantung pada *stakeholder* sekunder untuk dapat bertahan hidup.

Ethical theory stakeholder dianggap paling banyak diadopsi oleh perusahaan karena fokus pada *stakeholder* yang menentukan keberlangsungan perusahaan (Lu & Abeyskera, 2014). Namun, tidak disadari bahwa *stakeholder* sekunder juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perusahaan dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan bagi perusahaan. Media, sebagai contoh, secara tidak langsung dapat menggiring opini publik tentang perusahaan melalui berita negatif yang dipublikasikan ke masyarakat. Masyarakat kemudian memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan yang menyebabkan citra perusahaan menjadi tidak baik. Fenomena seperti ini menggambarkan bahwa setiap kelompok *stakeholder* memiliki cara yang berbeda mempengaruhi dan meminta perhatian dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih baik untuk tidak hanya fokus pada *stakeholder* yang dianggap kunci tetapi juga pada semua *stakeholder* karena setiap *stakeholder* memiliki kemampuan mempengaruhi perusahaan dengan caranya sendiri.

Dilihat dari sudut pandang teori institusional perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban dan pengungkapan karena mendapatkan tekanan baik dari dinamika sosial maupun dalam diri perusahaan sendiri (DiMaggio & Powell, 1983; Rudyanto, 2019). Perusahaan perlu untuk berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang dapat diterima oleh berbagai konstituen sejauh aturan kelembagaan dimasukkan dalam organisasi sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi, sumber daya dan stabilitas serta untuk meningkatkan prospek kelangsungan hidup (Lu et al., 2015). Hal ini mendorong perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan menyesuaikan bentuk perusahaan sesuai dengan lingkungannya. Kondisi terse-

but menimbulkan tekanan kelembagaan pada perusahaan untuk melakukan praktik tertentu (Cahaya et al., 2017). Manajer mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dalam rangka untuk memberikan respon atas tekanan yang diterima.

Dalam teori institusional ini pengungkapan informasi tidak hanya didorong oleh permintaan sosial atau *stakeholder* tetapi juga sumber permintaan atau tekanan lain (Cahaya et al., 2017). DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan bahwa organisasi akan mengalami homogenisasi ketika menghadapi kondisi yang sama yang dikenal dengan istilah *isomorphism*. *Isomorphism* terdiri dari tiga pilar yaitu *coercive*, *mimetic*, dan *normative*. Melalui *coercive* perusahaan mendapatkan tekanan dari *stakeholder* tempat perusahaan bergantung. *Mimetic* adalah situasi di mana organisasi meniru perusahaan lain untuk mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan legitimasi. *Normative* adalah tekanan yang muncul dari norma kelompok untuk melakukan praktik tertentu untuk memenuhi tuntutan profesionalisme (Lu et al., 2015). Praktik pengungkapan lingkungan perusahaan merupakan luaran dari tekanan tersebut dalam rangka merespon tekanan *stakeholder*, praktik organisasi lain, dan profesionalisme.

Praktik pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan pada umumnya dimotivasi oleh pemeliharaan dan peningkatan kontrak sosial yang telah diperoleh. Untuk mencapai ini perusahaan harus menyelaraskan nilai perusahaan dengan nilai dari para *stakeholder*. Kegagalan dalam proses ini akan berdampak pada pencabutan kontrak sosial yang telah diberikan ke perusahaan. Ini menunjukkan bahwa keberlangsungan perusahaan ditentukan oleh persepsi dari masyarakat luas. Jika perusahaan dianggap melanggar kontrak sosial dan masyarakat tidak puas karena perusahaan beroperasi dengan tidak benar maka perusahaan akan diminta untuk berhenti beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk memahami nilai *stakeholder* dan perusahaan menyesuaikan nilainya untuk mempertahankan dan meningkatkan legitimasi (Deegan, 2019; Parker et al., 2015).

Pedoman pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mensyaratkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memiliki aktivitas tanggung jawab perusahaan dan dilaporkan kepada publik seperti yang diatur dalam Un-

dang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017. Meskipun regulasi pelaporan CSR telah diterbitkan, saat ini belum ada pedoman pelaporan CSR yang memandu perusahaan dalam menyusun laporan tersebut. Oleh karena itu, isi dan format dari laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan tidak standar dan terkesan sangat subjektif karena mengikuti kepentingan dari perusahaan itu sendiri.

Untuk menyusun laporan keberlanjutan atau CSR, perusahaan diperbolehkan untuk secara mandiri mencari pedoman pelaporan tersebut. Saat ini terdapat pedoman pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diadopsi oleh sebagian besar perusahaan di dunia yaitu standar yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Pedoman GRI ini mencakup triple bottom line dalam keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, GRI juga menyediakan panduan pelaporan untuk *governance*. Dalam menentukan konten pelaporan, pedoman ini mensyaratkan perusahaan untuk melibatkan para *stakeholder* dan menjelaskan bagaimana perusahaan menanggapi ekspektasi mereka. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk menyajikan kinerja perusahaan yang mencakup kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian ini fokus pada upaya untuk mencari tahu tingkat praktik pengungkapan kategori lingkungan dan alasan di balik pengungkapan. Kategori lingkungan dalam GRI terdiri dari 12 aspek pengungkapan lingkungan dengan penjelasan singkat sebagai berikut. Pertama adalah material, yang menitikberatkan pada pelaporan material terbarukan, tidak terbarukan, dan daur ulang, yang digunakan dalam produksi. Energi, yang mencakup sumber dan intensitas penggunaan energi beserta pengurangannya. Air, yang melaporkan jumlah pengambilan air, daur ulang, dan dampaknya. Keanekaragaman hayati, yang menjelaskan dampak keberadaan perusahaan pada ekosistem flora dan fauna. Emisi, yang berisi indikator terkait gas rumah kaca. Efluen dan limbah, yang berisi jumlah limbah dan tumpahan yang dihasilkan. Produk dan jasa, menekankan pada mitigasi produk dan jasa terhadap lingkungan. Kepatuhan, menilai sanksi moneter dan nonmoneter dari ketidakpatuhan. Transportasi, menitikberatkan pada dampak lingkungan dari aktivi-

Tabel 1. Jumlah Pengungkapan Perusahaan di Setiap Aspek Lingkungan

Aspek/Indikator Lingkungan	Frekuensi¹	Persentase (%)²
Bahan	34	54,84
Energi	58	93,55
Air	47	75,81
Keanekaragaman Hayati	32	51,61
Emisi	47	75,81
Tumpahan dan Limbah	49	79,03
Produk dan Jasa	4	6,45
Kepatuhan	28	45,16
Transportasi	1	1,61
Lain-lain	0	0
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	13	20,97
Pengaduan Lingkungan	4	6,45

Keterangan:

¹ Total perusahaan yang mengungkapkan setiap aspek lingkungan di tahun 2018.

² Frekuensi dibagi total perusahaan yang diteliti yaitu 62 perusahaan dikali 100%.

tas pengangkutan. Lain-lain, berisi tentang pengeluaran dan investasi lingkungan. Asesmen pemasok terhadap lingkungan mencakup pertanggungjawaban lingkungan pada proses rantai pasokan. Terakhir adalah mekanisme pengaduan lingkungan yang merupakan pelaporan atas jumlah pengaduan lingkungan dan penanganannya.

Kategori lingkungan yang paling banyak diungkapkan. Pembahasan dimulai dengan melihat frekuensi kategori dari aspek lingkungan yang diungkapkan dan mencari alasan yang mungkin dari aspek lingkungan yang dominan dilakukan oleh perusahaan. Tabel 1 menyajikan perusahaan yang melakukan pengungkapan pada setiap aspek lingkungan yang ada di GRI. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah melakukan pengungkapan lingkungan pada aspek-aspek sensitif yang memberikan dampak nyata terhadap kerusakan lingkungan. Energi merupakan aspek yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan yang diikuti oleh tumpahan dan limbah, air, dan emisi. Fakta ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memikirkan dan mengimplementasikan manajemen energi sebagai upaya untuk konservasi terutama pada energi terbarukan. Pedoman GRI pada aspek energi mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan jumlah energi yang dikonsumsi se-

perti energi yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Selain itu, perusahaan diminta untuk melaporkan pengurangan konsumsi energi dalam satu periode.

Energi diketahui sebagai sumber tenaga untuk proses operasional dan produksi suatu perusahaan (Warren & Jack, 2018). Energi pada umumnya berasal dari energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang diperoleh melalui aktivitas pertambangan. Selain itu, pemanfaatan energi fosil juga berkontribusi pada penambahan emisi karbon di udara. Hal ini memperlihatkan bahwa energi menjadi aspek yang dapat dikatakan sangat sensitif karena dari proses perolehan hingga pemanfaatannya memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan. Perolehan energi dari proses pertambangan mengancam bentang alam bumi dan pemanfaatannya menghasilkan emisi karbon yang mengancam manusia melalui penurunan kualitas udara (Xue, 2020). Selain itu, energi dari fosil merupakan energi tidak terbarukan yang berarti ketersediaannya terancam bahkan dimungkinkan terjadi kelangkaan.

Alasan lain yang mungkin dalam pengungkapan energi adalah adanya dorongan dari Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009. Peraturan tersebut meminta semua pihak turut aktif melakukan konservasi energi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, peme-

rintah daerah kabupaten/kota, pengusaha, dan masyarakat. Peraturan tersebut menjelaskan secara detail setiap tanggung jawab setiap pihak dalam upaya konservasi energi. Pengusaha termasuk industri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan konservasi energi pada setiap tahapan pelaksanaan usaha. Selain itu, industri juga bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi yang efisien energi serta menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi. Berdasarkan peraturan ini jelas bahwa pemerintah mendorong perusahaan untuk memperhatikan konservasi energi dengan melakukan pengurangan energi yang digunakan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada aspek energi sebagai upaya untuk memenuhi apa yang diminta oleh pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* mempunyai kekuatan yang besar terutama dalam membuat peraturan atau regulasi. Melalui pengungkapan, perusahaan telah menginformasikan kepada pemerintah bahwa perusahaan telah melakukan apa yang diharapkan pemerintah. Implikasi dari pengungkapan ini adalah legitimasi perusahaan tetap terjaga sekaligus dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi (Deggan, 2019; Lu & Abeysekera, 2014).

Kategori pengungkapan tertinggi berikutnya adalah tumpahan dan limbah. Limbah merupakan residu dari operasional perusahaan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan seperti pencemaran air yang mengurangi kualitas air untuk keberlangsungan makhluk hidup. Limbah merupakan aspek yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat karena masyarakat di sekitar lokasi operasional sangat dekat dengan limbah dan bahkan merasakan dampak langsung dari limbah perusahaan. Selain itu, masyarakat dalam ancaman kesehatan yang serius sehingga mereka menuntut untuk pengelolaan limbah yang memadai dari perusahaan. Di Indonesia terdapat fakta bahwa masyarakat sangat aktif melakukan aksi protes ke perusahaan untuk mengelola limbah dengan baik. Jika tidak, masyarakat sebagai *stakeholder* akan berupaya untuk mencabut legitimasi perusahaan karena dampak negatif yang dirasakan masyarakat (Dosinta & Brata, 2020). Oleh karena itu, pengungkapan soal limbah dilakukan khususnya untuk meminimalisasi konflik atau isu negatif dari masyarakat (Deegan, 2019).

Sebuah hasil menarik ditemukan bahwa perusahaan banyak melakukan pengungkapan terhadap air. Air merupakan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang hidup di bumi. Selain itu, air juga dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan baku untuk proses produksi ataupun untuk penunjang operasional perkantoran (Christ 2014; Taghian et al., 2015). Air seringkali dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak terbatas karena kemudahannya untuk ditemukan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ketersediaan air tidak sebesar sumber daya alam lainnya (Wicaksono et al. 2020).

Pada sisi yang lain, terdapat fakta bahwa ketersediaan air khususnya di bumi hanya sedikit dan secara perlahan menuju kelangkaan air. Dari total air di bumi hampir 97% air adalah di laut dan 3% adalah air bersih (Fogel & Palmer, 2014). Ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih sangat kecil dan rentan untuk langka apabila terjadi eksploitasi air dalam jumlah besar. Kelangkaan air ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti pertumbuhan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan permintaan yang lebih besar terhadap air (Lauesen, 2016; Vinnari & Laine, 2013). Selain itu, adanya perubahan iklim di bumi juga berkontribusi terhadap percepatan kelangkaan air.

Pengungkapan pertanggungjawaban terhadap air ini memberikan sinyal bahwa air sudah mendapatkan banyak perhatian dari perusahaan untuk menjaga ketersediaannya di bumi. Perusahaan menyadari bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan semua makhluk hidup sehingga pertanggungjawaban atas air perlu untuk dilakukan melalui manajemen penggunaan air. Selain itu, perusahaan mungkin menerima berbagai tekanan dari *stakeholder* untuk melakukan pertanggungjawaban air karena menipisnya ketersediaan air akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup manusia dan makhluk lainnya. Penggunaan air adalah baik untuk kehidupan dan ekonomi, tetapi menjaga ketersediaan air merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. *Stakeholder* memberikan tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban air tidak hanya untuk perusahaan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap air tetapi juga perusahaan-perusahaan dengan

Tabel 2. Perbandingan Pengungkapan Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah dan Nonkepemilikan Pemerintah

Aspek/Indikator Lingkungan	Frekuensi ³		Perbandingan (1:1,5) ⁴	
	NKP ¹	KP ²	NKP ¹	KP ²
Bahan	22	12	22	18
Energi	33	25	33	37
Air	28	19	28	29
Keanekaragaman Hayati	21	11	21	17
Emisi	27	20	27	30
Tumpahan dan Limbah	31	18	31	27
Produk dan Jasa	2	2	2	3
Kepatuhan	15	13	15	20
Transportasi	1	0	1	0
Lain-lain	0	0	0	0
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	11	1	11	2
Pengaduan Lingkungan	14	0	14	0

Keterangan:

¹ NKP adalah perusahaan tanpa adanya kepemilikan pemerintah sebagai pemegang saham.

² KP adalah perusahaan dengan adanya kepemilikan pemerintah sebagai pemegang saham.

³ Frekuensi pengungkapan aspek lingkungan dari NKP (n=37) dan KP (n=25).

⁴ Perbandingan diterapkan untuk mengukur tingkat pengungkapan dengan membuat persepsi kesetaraan jumlah perusahaan di setiap kelompok. Frekuensi NKP sebagai dasar sehingga nilai perbandingan NKP sama dengan frekuensinya, sedangkan nilai perbandingan KP diperoleh dari frekuensi KP dikali 1,5.

sensitivitas rendah. Hal ini karena setiap perusahaan menggunakan air dalam jumlah yang besar sehingga perusahaan merupakan salah satu kontributor yang mempercepat kelangkaan air.

Perbandingan pengungkapan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah dengan nonkepemilikan pemerintah. Penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian yang dilakukan untuk memahami pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan lingkungan ataupun sosial. Hasil penelitian menunjukkan terdapat inkonsistensi hubungan antara kedua variabel tersebut. Jika demikian, meninggalkan sebuah kebingungan bagaimana sebenarnya keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham, apakah memberikan pengaruh terhadap pengungkapan atau tidak. Penelitian He & Loftus (2014) misalnya, menemukan bahwa adanya kepemilikan pemerintah mendorong adanya pengungkapan. Temuan ini dapat mengisyaratkan bahwa pengungkapan cenderung dominan dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan pemerintah sedangkan nonkepemilikan pemerintah tidak melakukan pengungkapan. Di

Indonesia dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 mendorong perusahaan untuk memiliki program dan aktivitas CSR bahkan hingga ke pengungkapan ataupun laporan CSR. Ini mengindikasikan bahwa pengungkapan dan pelaporan CSR tidak semata-mata bergantung pada ada tidaknya kepemilikan pemerintah sebagai pemegang saham. Pengungkapan dan pelaporan CSR menjadi media komunikasi antara perusahaan dengan semua *stakeholder*-nya (Xue, 2020).

Hasil perbandingan berdasarkan pengategorian sampel ke dalam dua kelompok berdasarkan ada tidaknya kepemilikan pemerintah (Tabel 2) menunjukkan bahwa secara umum tidak ada kelompok yang mendominasi pada semua aspek pengungkapan lingkungan. Perusahaan tanpa kepemilikan pemerintah lebih banyak melakukan pengungkapan pada aspek bahan, keanekaragaman hayati, tumpahan dan limbah, transportasi, asesmen pemasok atas lingkungan, dan pengaduan lingkungan. Sementara itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih banyak mengungkapkan aspek energi,

air, emisi, produk dan jasa, dan kepatuhan. Hal ini disebabkan setiap perusahaan bebas untuk memilih aspek apa yang akan diungkapkan. Mengacu kepada *stakeholder theory*, perusahaan tidak wajib untuk melakukan pengungkapan pada semua aspek melainkan mengungkapkan pada aspek yang dipandang perlu khususnya memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholder* primer.

Melihat hasil perbandingan pengungkapan pada Tabel 2, penelitian ini berargumen bahwa adanya kepemilikan pemerintah tidak selalu menjadi pendorong pengungkapan lingkungan. Faktanya, perusahaan tanpa kepemilikan pemerintah tetap melakukan pengungkapan lingkungan. Namun, melihat secara rinci setiap aspek dari pengungkapan lingkungan, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung memiliki perilaku untuk mempertahankan nama baik (*image*) perusahaan. Mempertahankan nama baik perusahaan tidak selalu dengan melakukan pengungkapan sebanyak-banyaknya tetapi juga dapat dilakukan dengan tidak melakukan pengungkapan. Perusahaan akan melakukan pengungkapan ketika ingin mendapatkan reaksi positif dari *stakeholder* khususnya ketika *stakeholder* diterpa isu negatif tentang lingkungan (Islam & Islam, 2011; Rangkuti et al, 2019). Di sisi lain, perusahaan dengan performa lingkungan yang buruk cenderung akan menutupi sehingga pengungkapan tidak dilakukan.

Penelitian ini kemudian berargumen bahwa adanya kepemilikan saham dari pemerintah di dalam sebuah perusahaan mempengaruhi perilaku manajemen untuk melakukan dan tidak melakukan pengungkapan lingkungan. Pada umumnya pemerintah memiliki kendali untuk mengatur manajemen perusahaan karena besarnya jumlah saham yang dimiliki dan tergolong sebagai pemegang saham pengendali. Hal ini jelas bahwa pengungkapan yang dilakukan perusahaan merefleksikan wajah pemerintah yang sewajarnya mendukung keberlanjutan lingkungan melalui berbagai program. Fakta dari Tabel 2 perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih banyak mengungkapkan pada pemanfaatan sumber daya alam (energi, air, emisi) dan kepatuhan (terhadap regulasi). Di sisi lain, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung diam ketika diminta untuk melakukan pengungkapan mengenai asesmen pemasok dan keluhan.

Pengungkapan dari aspek penggunaan sumber daya alam dan kepatuhan adalah wajar adanya. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tentu akan melakukan pengungkapan pada aspek tersebut karena pemerintah memiliki peraturan-peraturan tanggung jawab lingkungan (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009) dan semangat keberlanjutan melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*). Meskipun semangat 3R ditekankan untuk menekan jumlah sampah tetapi juga melengkapi aspek penggunaan sumber daya yang harus diminimalkan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam sekaligus perlindungan lingkungan. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih aktif untuk melakukan pengungkapan dalam aspek kepatuhan. Aspek kepatuhan memiliki makna seberapa jauh perusahaan patuh terhadap regulasi lingkungan. Perusahaan dengan kepemilikan ke pemerintah mengungkapkan aspek ini lebih banyak karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan telah patuh terhadap peraturan. Selain itu, pengungkapan aspek ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pemegang saham telah memainkan perannya dengan baik untuk membawa perusahaan melakukan pertanggungjawaban seperti apa yang telah diatur sendiri oleh pemerintah.

Biasanya perusahaan dengan kepemilikan pemerintah berada dalam pengawasan dan tekanan dari *stakeholder* yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah diketahui lebih banyak mengungkapkan pada kategori energi dan air yang mana dampak negatif perusahaan dari dua kategori tersebut sangat dekat kaitannya dengan masyarakat. Kedua kategori tersebut merupakan sumber daya yang sudah seharusnya dikendalikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat luas. Melalui pengungkapan perusahaan secara tidak langsung mencerminkan muka pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya tersebut. Energi dianggap sebagai sumber daya yang dihasilkan dari proses pertambangan yang diketahui memberikan dampak negatif terhadap bumi dan masyarakat di samping belum maksimalnya produksi energi dari bahan yang ramah lingkungan. Pemerintah sebagai penjamin dan bertanggung jawab atas hal ini mendorong perusahaan untuk melaku-

kan aktivitas pertanggungjawaban terhadap penggunaan energi.

Pada kategori air pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan air yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesejahteraan sosial seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33. Dengan adanya nilai ini, perusahaan yang dimiliki pemerintah berada dalam tekanan untuk menjaga ketersediaan air meskipun perusahaan memanfaatkan air untuk operasional bisnisnya. Selain itu, karena air adalah kebutuhan dasar manusia, masyarakat dan kelompok *stakeholder* lain akan memberikan pengaruhnya terhadap perusahaan untuk peduli terhadap ketersediaan air. Pemerintah kemudian mendorong perusahaan untuk memberikan perhatian kepada air sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mencapai dan mempertahankan kesejahteraan rakyat melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017.

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah, di sisi lain, menutupi aspek pengungkapan lingkungan ketika perusahaan dalam performa buruk. Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tidak banyak melakukan pengungkapan pada asesmen pemasok atas lingkungan dan keluhan lingkungan. Penelitian ini tidak berfikir bahwa perusahaan tidak melakukan asesmen lingkungan terhadap pemasok dan tidak menerima keluhan. Pada dasarnya perusahaan yang berkelanjutan memperhatikan dampak lingkungan setiap proses bisnis termasuk rantai pasokan. Dalam hal keluhan, adanya perkembangan teknologi membuat penyampaian keluhan dapat dengan mudah dilakukan seperti melalui *e-mail* dan sosial media.

Fenomena ini mengundang perhatian mengapa asesmen pemasok tidak diungkapkan di laporan perusahaan. Alasan potensial yang muncul adalah perusahaan tidak memiliki cukup banyak pemasok sehingga apabila kriteria itu diterapkan, maka tidak ada pemasok sehingga proses produksi akan terganggu. Alasan lain mungkin adalah perusahaan mencari keuntungan ekonomi dari proses penawaran yang diberikan para pemasok. Perusahaan cenderung mencari pemasok dengan harga yang lebih murah tetapi mengabaikan asesmen lingkungan daripada yang lainnya. Cerita ini dapat juga mengarah pada proses ketidaknetralan perusahaan da-

lam menentukan pemasok terlebih adanya intervensi dari pemerintah sebagai pemegang saham pengendali. Pada aspek keluhan lingkungan, perusahaan tidak mengungkapkan jumlah keluhan karena pengungkapan ini menjadi cerminan bahwa perusahaan sebenarnya berada dalam performa lingkungan yang tidak bagus. Banyaknya keluhan dapat diartikan sebagai sebuah ancaman bagi nama perusahaan terutama adanya pemerintah dalam struktur pemegang saham. Hal ini mungkin jadi aspek yang dihindari untuk diketahui publik karena pemerintah tidak menginginkan nama perusahaan yang dimilikinya diterpa isu-isu negatif.

Pada dasarnya perusahaan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban untuk memberikan dan mempertahankan citra baik perusahaan sehingga akan mengungkapkan aspek yang bernada positif (Hafez, 2018). Penjelasan ini memberikan gambaran adanya pemerintah sebagai pemegang saham mendorong pengungkapan lingkungan tetapi hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut memilih aspek mana yang sesuai dengan peraturan dan regulasi dari pemerintah dan ingin menunjukkan kepatuhannya. Selain itu, ada unsur mempertahankan nama baik perusahaan termasuk pemerintah jika perusahaan mengungkapkan aspek sensitif (misalnya, penggunaan sumber daya alam) yang diatur oleh regulasi pemerintah.

Di sisi lain, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung tidak mengungkapkan aspek-aspek di luar aspek sensitif seperti asesmen pemasok atas lingkungan, dan keluhan lingkungan. Menariknya, tidak diungkapkannya aspek tersebut memunculkan dugaan bahwa perusahaan sedang menutupi performa buruknya. Hal ini dikarenakan asesmen pemasok atas lingkungan merepresentasikan kepedulian lingkungan perusahaan dalam rantai pasokan dan keluhan lingkungan yang menunjukkan pengelolaan dampak operasi perusahaan tidak baik. Oleh karena itu, pengujian dengan variabel kepemilikan pemerintah lebih baik memperhatikan pada pengujian salah satu aspek lingkungan (misalnya, Liesen et al., 2015). Setiap aspek lingkungan ditanggapi berbeda oleh perusahaan terutama pada kepentingan mempertahankan nama baik.

Perbandingan pengungkapan perusahaan dengan kepemilikan asing dengan nonkepemilikan asing. Peneliti dalam memprediksi pengungkapan lingkungan pe-

Tabel 3. Perbandingan Pengungkapan Perusahaan dengan Kepemilikan Asing dan Nonkepemilikan Asing

Aspek/Indikator Lingkungan	Frekuensi ³		Perbandingan (1:1,8) ⁴	
	NKA ¹	KA ²	NKA ¹	KA ²
Bahan	22	12	22	22
Energi	36	22	36	40
Air	31	16	31	29
Keanekaragaman Hayati	20	12	20	22
Emisi	29	18	29	32
Tumpahan dan Limbah	31	18	31	32
Produk dan Jasa	2	2	2	4
Kepatuhan	17	11	17	20
Transportasi	1	0	1	0
Lain-lain	0	0	0	0
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	7	6	7	11
Pengaduan Lingkungan	3	1	3	2

Keterangan:

¹ NKA adalah perusahaan tanpa adanya kepemilikan asing sebagai pemegang saham.

² KA adalah perusahaan dengan adanya kepemilikan pemerintah asing pemegang saham.

³ Frekuensi pengungkapan aspek lingkungan dari NKA (n=40) dan KA (n=22).

⁴ Perbandingan diterapkan untuk mengukur tingkat pengungkapan dengan membuat persepsi kesetaraan jumlah perusahaan di setiap kelompok. Frekuensi NKA sebagai dasar sehingga nilai perbandingan NKA sama dengan frekuensinya, sedangkan nilai perbandingan KA diperoleh dari frekuensi KA dikali 1,8.

rusahaan menggunakan kepemilikan asing sebagai variabel independen. Kepemilikan asing memberikan makna bahwa variasi *shareholder* perusahaan menjadi lebih besar. Variasi *shareholder* tersebut akan menghasilkan tuntutan dan permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan. Parker et al. (2015) berargumentasi bahwa pemegang saham asing cenderung meminta pengungkapan dengan tingkatan tinggi karena perbedaan letak geografis antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Ijabadeniyi & Govender (2019) dan Ismail et al. (2018) menemukan sebuah prediksi bahwa adanya kepemilikan asing mendorong pengungkapan lingkungan. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa tidak ada pengaruh dari kepemilikan asing terhadap pengungkapan (He & Loftus, 2014).

Penelitian ini menguji kepemilikan asing secara deskriptif dan hasilnya tersaji di dalam Tabel 3. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan adanya kepemilikan asing lebih banyak melakukan pengungkapan dibandingkan dengan perusahaan tanpa kepemilikan asing. Temuan dalam pengujian ini sejalan dengan pene-

litian sebelumnya yang memprediksi adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan (Ismail et al., 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa pemegang saham asing memiliki komitmen untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Semangat dari *sustainable development goals* (SDGs) yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih baik diterapkan oleh pemegang saham asing dalam menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Selain itu, karena persoalan letak geografis, pemegang saham asing meminta semua informasi kepada perusahaan termasuk informasi aktivitas CSR melalui pengungkapannya (Cai et al., 2019). Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan baik yang berarti bahwa legitimasi perusahaan tetap terjaga dengan baik pula.

Dampak adanya kepemilikan asing cenderung lebih mendorong adanya pengungkapan karena nilai dan perhatiannya pada isu sosial lingkungan. Yu & Zheng (2020) berargumentasi bahwa pemegang saham asing khususnya dari negara yang memiliki

standar CSR dan pengungkapan yang tinggi akan memberikan perhatian yang lebih terhadap CSR dan pengungkapan. Dyck et al. (2019) berargumentasi bahwa pemegang saham asing akan menanamkan norma sosial yang diyakininya ke perusahaan luar negeri mereka melakukan investasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemegang asing dari negara yang memiliki norma sosial tinggi akan memberikan pengaruh kepada performa sosial dan lingkungan perusahaan ketika investor asing tersebut berasal dari negara yang menjunjung tinggi isu sosial dan lingkungan. Oh et al. (2011) menambahkan bahwa gaya praktik manajemen barat (*Western-style management practices*) memiliki tingkat CSR lebih tinggi yang diimplementasikan di perusahaan di Asia. Perusahaan di Indonesia, berdasarkan Tabel 3, mengungkapkan lebih banyak aspek lingkungan untuk menyelaraskan nilai perusahaan dengan nilai pemegang saham asing yang memiliki standar CSR dan pengungkapan yang tinggi.

Permintaan pengungkapan yang lebih dari pemegang saham asing beralasan karena mereka membutuhkan informasi untuk mengurangi potensi terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan investor asing (Dhaliwal et al., 2011) karena merupakan bentuk transparansi perusahaan. Pemegang saham asing membutuhkan pengungkapan itu untuk membantu melihat prospek perusahaan di masa depan. Kemudian, pengungkapan digunakan untuk membantu investor asing dalam kegiatan pengawasan perusahaan. Permintaan pengungkapan yang lebih tinggi oleh investor asing karena adanya kesulitan dan biaya yang lebih tinggi untuk memperoleh informasi karena jarak letak geografis (Cai et al., 2019). Pengungkapan perusahaan juga dijadikan dasar untuk pembuatan keputusan peningkatan jumlah investasi dari investor asing (Elberry & Hussainey, 2020; Zhong & Gao, 2017). Keuntungan untuk perusahaan adalah tingginya permintaan pengungkapan oleh pemegang saham asing dapat memberikan tambahan peluang dalam menarik investor asing ataupun domestik (Yu & Zheng, 2020) yang tentu berdampak semakin tingginya permintaan informasi dan pengungkapan.

Perusahaan dengan kepemilikan asing melakukan lebih banyak pengungkapan pada aspek energi. Fakta ini menunjukkan bahwa pemegang saham asing menganggap bahwa isu energi adalah isu yang paling penting yang memberikan dampak negatif

terhadap sosial dan lingkungan sehingga pertanggungjawaban terhadap energi harus dilakukan pertama kali. Selain itu, temuan ini memberikan gambaran bahwa isu energi ini merupakan isu global karena kontribusinya dalam menghasilkan berbagai macam kerusakan lingkungan dan ancaman bagi masyarakat. Pemegang saham asing menyadari dampak negatif dari penggunaan energi terutama yang bersumber dari fosil dan hasil tambang sehingga perusahaan perlu untuk mengelola pemanfaatan energi dalam proses bisnis perusahaan. Ancaman yang nyata dari pemanfaatan energi adalah adanya pemanasan global yang mengubah iklim bumi dan telah menjadi perhatian dari masyarakat global. Pemanfaatan atas energi ini juga tidak terlepas dari emisi yang merupakan residu dari penggunaan energi yang berkontribusi pada perubahan iklim. Isu emisi juga mendapatkan perhatian dari pemegang saham asing yang ditunjukkan dengan tingginya pengungkapan emisi oleh perusahaan dengan kepemilikan asing.

Perusahaan nonkepemilikan asing mengungkapkan lebih banyak pertanggungjawaban air daripada perusahaan kepemilikan asing. Hal ini mengisyaratkan bahwa terjadi pemisahan konsentrasi pengungkapan pertanggungjawaban antara perusahaan kepemilikan dan nonkepemilikan asing. Perusahaan nonkepemilikan asing lebih menekankan kategori pertanggungjawaban yang dekat dengan masyarakat misalnya air. Air diketahui sebagai kebutuhan dasar untuk kehidupan masyarakat sehingga pertanggungjawaban terhadap air dapat dikatakan tepat untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat bahkan *stakeholder*-nya dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Perbandingan pengungkapan perusahaan dengan operasi internasional dengan nonoperasi internasional. Untuk menambah pangsa pasar dan memaksimalkan laba, perusahaan memutuskan untuk beroperasi secara internasional. Dampak dari internasionalisasi ini adalah perusahaan memiliki *stakeholder* yang lebih luas tidak hanya dari negara asal perusahaan tersebut tetapi juga *stakeholder* dari negara lain tempat perusahaan beroperasi. Hal ini memberikan tekanan lebih banyak ke perusahaan untuk menampilkan aktivitas CSR dan pengungkapannya. Cahaya et al. (2017) dengan menggunakan sampel perusahaan di Indonesia menemukan bahwa perusahaan

Tabel 4. Perbandingan Pengungkapan Perusahaan dengan Operasi Internasional dan Nonoperasi Internasional

Aspek/Indikator Lingkungan	Frekuensi ³		Perbandingan (1:1,2) ⁴	
	NOI ¹	OI ²	NOI ¹	OI ²
Bahan	19	15	19	19
Energi	32	26	32	32
Air	27	20	27	24
Keanekaragaman Hayati	15	17	15	20
Emisi	24	23	24	28
Tumpahan dan Limbah	25	24	25	29
Produk dan Jasa	2	2	2	3
Kepatuhan	15	13	15	16
Transportasi	1	0	1	0
Lain-lain	0	0	0	0
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	8	5	8	6
Pengaduan Lingkungan	4	0	4	0

Keterangan:

¹ NOI adalah perusahaan tanpa adanya operasi internasional.

² OI adalah perusahaan dengan adanya operasi internasional.

³ Frekuensi pengungkapan aspek lingkungan dari NOI (n=34) dan OI (n=28).

⁴ Perbandingan diterapkan untuk mengukur tingkat pengungkapan dengan membuat persepsi kesetaraan jumlah perusahaan di setiap kelompok. Frekuensi NOI sebagai dasar sehingga nilai perbandingan NOI sama dengan frekuensinya, sedangkan nilai perbandingan OI diperoleh dari frekuensi OI dikali 1,2.

akan melakukan pengungkapan lebih banyak ketika beroperasi secara internasional. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan cenderung mendapatkan lebih besar tekanan internasional seperti pemerintah negara lain, lembaga pemerhati lingkungan, masyarakat, bahkan dari nilai budaya negara setempat.

Tabel 4 menampilkan frekuensi pengungkapan lingkungan dari perusahaan dengan operasi internasional dan tidak operasi internasional. Sejalan dengan Cahaya et al. (2017), perusahaan dengan operasi internasional cenderung mengungkapkan lebih banyak daripada yang tidak memiliki operasi internasional. Perusahaan tersebut melakukan pengungkapan lebih banyak pada aspek-aspek yang sensitif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti emisi, limbah, dan keanekaragaman hayati. Perusahaan nonoperasi internasional hanya unggul pada aspek air dari aspek sensitif yang tersedia. Temuan ini menjelaskan bahwa perusahaan Indonesia yang memiliki operasi internasional mendapatkan tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan. Perusahaan mendapatkan banyak permintaan untuk

memberikan informasi kepada *stakeholder*. Semakin luas ruang lingkup *stakeholder*, maka variasi permintaan juga beragam. Berdasarkan pada *ethical stakeholder theory*, perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi yang menjadi perhatian *stakeholder* baik primer maupun sekunder. Dengan pengungkapan ini perusahaan dapat meningkatkan legitimasinya untuk bertahan hidup lebih baik di arena internasional.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tekanan yang dirasakan perusahaan juga datang dari nilai budaya dan sosial di negara tempat operasi (Garcia-Sanchez et al., 2016; Smith et al., 2010). Negara yang memiliki budaya dan nilai yang tinggi terhadap keberlanjutan cenderung akan memberikan perhatian dan pengaruh dalam aktivitas CSR dan pengungkapan. Felix et al. (2018) menemukan bahwa negara dengan *stakeholder* yang religius akan memberikan perhatian lebih pada lingkungan. Sun et al. (2019) kemudian menyarankan untuk memberikan perhatian pada performa pertanggungjawaban sosial lingkungan jika perusahaan beroperasi pada wilayah atau negara dengan budaya yang ketat. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu

hulu, perusahaan Indonesia dengan operasi internasional juga merasakan hal yang sama yaitu perusahaan harus mengikuti peraturan atau regulasi setempat dan menyelaraskan nilai dengan budaya negara operasi. Pengungkapan lingkungan dianggap sebagai pemenuhan etika yang harus dilakukan perusahaan harus untuk melakukannya.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung mengungkapkan aspek yang sensitif untuk bertanggung jawab pada dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih banyak mengungkapkan aspek kepatuhan karena perusahaan mencerminkan pemerintah yang sudah seharusnya patuh terhadap regulasi dari pemerintah itu sendiri. Di sisi lain, perusahaan kepemilikan pemerintah menutupi aspek pengungkapan yang dianggap buruk yang merefleksikan performa buruk dari perusahaan dan pemerintah sebagai pihak yang berpengaruh di perusahaan. Pengungkapan pada aspek asesmen pemasok atas lingkungan tidak banyak dilakukan karena perusahaan mungkin tidak memiliki pemasok lain. Fenomena ini dapat menimbulkan kecurigaan pada proses pemilihan pemasok yang mungkin didasari adanya motif keuntungan ekonomi bahkan kemungkinan adanya kecurangan. Pengungkapan keluhan lingkungan tidak dilakukan karena menunjukkan performa yang buruk dari perusahaan yang secara tidak langsung juga menggambarkan *image* negatif pemerintah sebagai pemegang saham.

Perbandingan pada perusahaan dengan kepemilikan asing dan operasi internasional memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa keduanya memberikan dampak positif pada tingkat pengungkapan. Perusahaan dengan kepemilikan asing melakukan pengungkapan lebih banyak daripada perusahaan tanpa kepemilikan asing. Hal ini disebabkan investor asing meminta pengungkapan lebih banyak karena kurangnya kemampuan untuk mengawasi perusahaan dan ketidakmampuan mengawasi perusahaan akibat perbedaan letak geografis. Selain itu, investor asing cenderung memiliki komitmen pada aspek sosial dan lingkungan karena nilai dan budaya dari investor asing ditanamkan

ke dalam perusahaan. Pada aspek operasi internasional, perusahaan dengan operasi internasional mengungkapkan lebih banyak aspek daripada yang tidak. Hal ini disebabkan perusahaan mendapatkan tekanan dari *stakeholder* yang lebih luas tidak hanya dari negara asal tetapi juga dari negara tempat operasi. Perusahaan, dengan demikian, memiliki jumlah *stakeholder* yang lebih banyak dan luas sehingga permintaan informasi akan bervariasi. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti peraturan, nilai, dan budaya negara operasi untuk mempertahankan legitimasinya di arena internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer atas koentar dan saran yang sangat bernilai untuk meningkatkan kualitas artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adler, R., Mansi, & Pandey, R. (2018). Biodiversity and Threatened Species Reporting by the Top Fortune Global Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(3), 787–825. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2016-2490>
- Amos, G. J. (2018). Researching Corporate Social Responsibility in Developing-Countries Context: A Systematic Review of the Literature. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 284–310. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2017-0093>
- Bachmann, P., & Ingenhoff, D. (2016). Legitimacy through CSR Disclosures? The Advantage Outweighs the Disadvantages. *Public Relations Review*, 42, 386–394. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.02.008>
- Bella, V. D., & Al-Fayoumi, N. (2016). Perception of Stakeholders on Corporate Social Responsibility of Islamic Banks in Jordan. *EuroMed Journal of Business*, 11(1), 30–56. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2015-0003>
- Bendell, J., Miller, A., & Wortmann, K. (2011). Public Policies for Scaling Corporate Responsibility Standards: Expanding Collaborative Governance for Sustainable Development. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 2(2), 263–293. <https://doi.org/10.1108/20408021111185411>

- Cahaya, F. R., Porter, S., Tower, G., & Brown, A. (2015). The Indonesian Government's Coercive Pressure on Labour Disclosures: Conflicting Interests or Government Ambivalence? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(4), 475–497. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2014-0051>
- Cahaya, F. R., Porter, S., Tower, G., & Brown, A. (2017). Coercive Pressures on Occupational Health and Safety Disclosures. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(3), 318–336. <https://doi.org/10.1108/jaee-04-2015-0032>
- Cai, W., Lee, E., Xu, A. L., & Zeng, C. C. (2019). Does Corporate Social Responsibility Disclosure Reduce the Information Disadvantage of Foreign Investors? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 34, 12–29. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.02.001>
- Christ, K. L. (2014). Water Management Accounting and the Wine Supply Chain: Empirical Evidence from Australia. *British Accounting Review*, 46(4), 379–396. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.003>
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review*, 20(1), 92–117. <https://doi.org/10.2307/258888>
- Comyns, B. (2018). Climate Change Reporting and Multinational Companies: Insights from Institutional Theory and International Business. *Accounting Forum*, 42, 65–77. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.07.003>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy Theory: Despite its Enduring Popularity and Contribution, Time is Right For a Necessary Makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2011). Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. *Accounting Review*, 86(1), 59–100. <https://doi.org/10.2308/accr.00000005>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dobbs, S., & Staden, C. V. (2016). Motivations for Corporate Social and Environmental Reporting: New Zealand Evidence. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(3), 449–472. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2015-0070>
- Dosinta, N. F., & Brata, H. (2020). Politik Penamaan dalam Pelaporan Korporat Pascaimplementasi Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 138–158. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.09>
- Dyck, I. J. A., Lins, K. V., Roth, L., & Wagner, H. F. (2019). Do Institutional Investors Drive Corporate Social Responsibility? *International Evidence. Journal of Financial Economics*, 131(3), 693–714. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2708589>
- Elberry, N., & Hussainey, K. (2020). Does Corporate Investment Efficiency Affect Corporate Disclosure Practices? *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 309–327. <https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2019-0045>
- Felix, R., Hinsch, C., Rauschnabel, P. A., & Schlegelmilch, B. B. (2018). Religiousness and Environmental Concern: A Multilevel and Multi-Country Analysis of the Role of Life Satisfaction and Indulgence. *Journal of Business Research*, 91, 304–312. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.017>
- Finke, T., Gilchrist, A., & Mouzas, S. (2016). Why Companies Fail to Respond to Climate Change: Collective Inaction as an Outcome of Barriers to Interaction. *Industrial Marketing Management*, 58, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.05.018>
- Fogel, D. S., & Palmer, J. E. (2014). Water as a Corporate Resource. *Journal of Global Responsibility*, 5(1), 104–125. <https://doi.org/10.1108/jgr-02-2014-0007>
- Garcia-Sanchez, I. M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Frias-Aceituno, J. V. (2016). Impact of the Institutional Macro Context on the Voluntary Disclosure of CSR Information. *Long Range Planning*, 49, 15–35. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.02.004>
- Gunawan, J. (2015). Corporate Social Disclosures in Indonesia: Stakeholders' Influ-

- ence and Motivation. *Social Responsibility Journal*, 11(3), 535–552. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2014-0048>
- Hafez, M. (2018). Measuring the Impact of Corporate Social Responsibility Practices on Brand Equity in the Banking Industry in Bangladesh: The Mediating Effect of Corporate Image and Brand Awareness. *International Journal of Bank Marketing*, 36(5), 806–822. <https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2017-0072>
- Hazelton, J. (2013). Accounting as a Human Right: The Case of Water Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(2), 267–311. <https://doi.org/10.1108/09513571311303738>
- He, C., & Loftus, J. (2014). Does Environmental Reporting Reflect Environmental Performance? Evidence from China. *Pacific Accounting Review*, 26(1–2), 134–154. <https://doi.org/10.1108/PAR-07-2013-0073>
- Heniwati, E., & Asni, N. (2019). Intrinsic Value dari Pelaporan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 207–226. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10012>
- Hossain, M. M., & Alam, M. (2016). Corporate Social Reporting (CSR) and Stakeholder Accountability in Bangladesh: Perceptions of Less Economically Powerful Stakeholders. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 415–442. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2016-0064>
- Ijabadeniyi, A., & Govender, J. P. (2019). Coerced CSR: Lessons from Consumer Values and Purchasing Behavior. *Corporate Communications: An International Journal*, 24(3), 515–531. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-10-2018-0110>
- Islam, M. A., & Islam, M. A. (2011). Environmental Incidents in a Developing Country and Corporate Environmental Disclosures. *Society and Business Review*, 6(3), 229–248. <https://doi.org/10.1108/17465681111170984>
- Ismail, A. H., Rahman, A. A., & Hezabr, A. A. (2018). Determinants of Corporate Environmental Disclosure Quality of Oil and Gas Industry in Developing Countries. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(4), 527–563. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2018-0042>
- Iyer, G. R., & Jarvis, L. (2019). CSR Adoption in the Multinational Hospitality Context: A Review of Representative Research and Avenues for Future Research. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 31(6), 2376–2393. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-06-2018-0451>
- Kanyama, A. C., Kanyama, K. C., Wester, M., Snickare, L., & Söderberg, I. L. (2018). Climate Change Mitigation Efforts Among Transportation and Manufacturing Companies: The Current State of Efforts in Sweden According to Available Documentation. *Journal of Cleaner Production*, 196, 588–593. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.007>
- Lauesen, L. M. (2016). CSR Maturity and Motivation in the Water Sector. *Social Responsibility Journal*, 12(3), 506–522. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2015-0063>
- Liesen, A., Hoepner, A. G., Patten, D. M., & Figge, F. (2015). Does Stakeholder Pressure Influence Corporate GHG Emissions Reporting? Empirical Evidence from Europe. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 28(7), 1047–1074. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2013-1547>
- Lock, I., & Schulz-Knappe, C. (2019). Credible Corporate Social Responsibility (CSR) Communication Predicts Legitimacy: Evidence from an Experimental Study. *Corporate Communications: An International Journal*, 24(1), 2–20. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-07-2018-0071>
- Louie, J., Ahmed, K., & Ji, X. D. (2019). Voluntary Disclosures Practices of Family Firms in Australia. *Accounting Research Journal*, 32(2), 273–294. <https://doi.org/10.1108/ARJ-04-2016-0042>
- Lu, Y., & Abeysekera, I. (2014). Stakeholders' Power, Corporate Characteristics, and Social And Environmental Disclosure: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 64, 426–436. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.005>
- Lu, Y., Abeysekera, I., & Cortese, C. (2015). Corporate Social Responsibility Reporting Quality, Board Characteristics and Corporate Social Reputation: Evidence from China. *Pacific Accounting Review*, 27(1), 95–118. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2012-0053>

- Molinos-Senante, M., Maziotis, A., & Sala-Garrido, R. (2017). Assessing The Productivity Change of Water Companies in England and Wales: A Dynamic Metafrontier Approach. *Journal of Environmental Management*, 197, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.03.023>
- Nyahas, S. I., Ntayi, J. M., Kamukama, N., & Munene, J. (2018). Stakeholders Influence on Voluntary Disclosure Practices by Listed Companies in Nigeria: An Investigation of Managers' Perception. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 267–283. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2017-0110>
- Oh, W. Y., Chang, Y. K., & Martynov, A. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104, 283–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0912-z>
- Parker, C. M., Bellucci, E., Zutshi, A., Tortina, L., & Fraunholz, B. (2015). SME Stakeholder Relationship Descriptions in Website CSR Communications. *Social Responsibility Journal*, 11(2), 364–386. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2013-0114>
- Preslmayer, C., Kuttner, M., & Feldbauer-Durstmüller, B. (2018). Uncovering the Research Field of Corporate Social Responsibility in Family Firms: A Citation Analysis. *Journal of Family Business Management*, 8(2), 169–195. <https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2017-0032>
- Rangkuti, H., Yuliantoro, H., & Yefni, Y. (2019). Lebih Penting Mana Sustainability Report atau Laba Bagi Perusahaan Perkebunan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 365–378. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10021>
- Rudyanto, A. (2019). Mimetic Isomorphism as a Reason for Preparing Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 433–447. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.25>
- Smith, J. V. D. L., Adhikari, A., Tondkar, R. H., & Andrews, R. L. (2010). The Impact of Corporate Social Disclosure on Investment Behavior: A Cross-National Study. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29, 177–192. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.009>
- Siskawati, E., & Susilawati, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Sarira. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 470–486. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7067>
- Sun, J., Yoo, S., Park, J., & Hayati, B. (2019). Indulgence versus Restraint: The Moderating Role of Cultural Differences on the Relationship between Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance. *Journal of Global Marketing*, 32(2), 83–92. <https://doi.org/10.1080/08911762.2018.1464236>
- Taghian, M., D'Souza, C., & Polonsky, M. (2015). A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility, Reputation and Business Performance. *Social Responsibility Journal*, 11(2), 340–363. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2012-0068>
- Walker, N. L., Norton, A., Harris, I., Williams, A. P., & Styles, D. (2019). Economic and Environmental Efficiency of UK and Ireland Water Companies: Influence of Exogenous Factors and Rurality. *Journal of Environmental Management*, 241, 363–373. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.03.093>
- Warren, L., & Jack, L. (2018). The Capital Budgeting Process and the Energy Trilemma - A Strategic Conduct Analysis. *The British Accounting Review*, 50(5), 481–496. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.04.005>
- Wicaksono, A. P., & Kholid, M. N. (2019). Tujuan Tersembunyi dalam Penggunaan Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 63–81. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10004>
- Wicaksono, B., Djuminah, & Honggowati, S. (2020). Pengungkapan Air dalam Perspektif Agenda-Setting Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 600–612. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.34>
- Wolff, A., Gondran, N., & Brodhag, C. (2017). Detecting Unsustainable Pressures Exerted on Biodiversity by a Company. Application to the Food Portfolio of A Retailer. *Journal of Cleaner Production*, 166, 784–797. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.057>
- Villiers, C. D., & Alexander, D. (2014). The Institutionalisation of Corporate Social

- Responsibility Reporting. *British Accounting Review*, 46, 198–212. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.03.001>
- Vinnari, E., & Laine, M. (2013). Just a Passing Fad? The Diffusion and Decline of Environmental Reporting in the Finnish Water Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), 1107–1134. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2012-01002>
- Xue, Y. (2020). Empirical Research on Household Carbon Emissions Characteristics and Key Impact Factors in Mining Areas. *Journal of Cleaner Production*, 256, 120470. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120470>
- Yu, W., & Zheng, Y. (2020). Does CSR Reporting Matter to Foreign Institutional Investors in China? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100322. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100322>
- Zhong, M., & Gao, L. (2017). Does Corporate Social Responsibility Disclosure Improve Firm Investment Efficiency? Evidence from China. *Review of Accounting and Finance*, 16(3), 348–365. <https://doi.org/10.1108/RAF-05-2014-0054>